

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN,
PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI
SURAKARTA
(STUDY KASUS DI KECAMATAN LAWEYAN)**

Oleh : Kunto Hamidjoyo

Sidewalk trader existence always becomes a dilemma in every region. On the one hand, this activity can be income source for a part of society and can move economic wheel. On the other hand, it is considered as "a disease" because it can disturb cities beauty and order. Sidewalk trader problems are as if an ever lasting ones because government always encounters uneasy choices. In one side, government is obliged to provide the environment area for its citizen, but in another one, city order and area resource mapping also need a prominent provision. In the dilemmatic condition, the government issues its policy about Sidewalk Trader Structuting, Building, adn Ordering contained in Perda No. 8 Year 1995.

Tgus research explores the successful implementation of Perda No. 8 Year 1995 Surakarta Local Government and conducted a case study in Subdistrict Laweyan, Surakarta. Total population of this research is 708, and sampling techique employed is random sampling. Total sample is 240, and research instrumens employed are questionnaire, interview, and documentation. Questions validity test used in this research is Product Moment Pearson correlation and reliability test of Alpha Chronbach.

The result shows that there is a significant effect between environment condition, communication, and implementer behaviour on the successful implementation of Perda No. 8 Year 1995 Surakarta Local Government of 66.22 %, environment condition determined by other variable. From the determination of 66.22 %, while another 33.78 % is determined by other variable. From th determination of 66.22 %, environment condition contributes 25 %, communication contributes 53 % and implementer behaviour contributes 22 %. Thus, if there is an increase in environment condition, communication, and implementer behaviour, the successful implementation of the policy will increase as well.

Thus, an increase in the successful implementation of Perda No. 8 Year 1995 Surakarta Local Government in Subdistrict Laweyan can be achieved by improving the environment condition, communication and implementer behaviour in addition to improve other variable that need to be explored further rather than those three independent variables.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan atau perkembangan perkotaan amat besar peranannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena pergerakan penduduk. Hal ini terjadi karena di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis dan resiprokal antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Seiring dengan perubahan struktur ekonomi yang dipercepat oleh pembangunan, proporsi penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 1990 sekitar 55,5 juta orang (30,00 %) tinggal di perkotaan dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 75,3 juta (37,00 %). Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan dari 20,5 juta (17,00 %) pada awal 1970-an (Biro Pusat Statistik Jawa Tengah 1970, 1990, 2000).

Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia, pertumbuhan penduduk kota Surakarta mengalami peningkatan yang tajam, karena kota Surakarta selain berfungsi melayani masyarakat kota secara administratif juga berperan melayani masyarakat regional yaitu daerah-daerah sekitar kota Surakarta tanpa melihat batas administrasi pemerintahan, seperti Kabupaten Sukoharjo, Boyolalo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosuko Wonosraten). Pertumbuhan penduduk kota Surakarta yang semakin pesat tersebut berimplikasi terhadap jumlah angkatan kerja yang jika tidak segera ditangani akan meningkatkan jumlah pengangguran di kota. Meningkatnya jumlah tenaga kerja harus diimbangi dengan peluang lapangan kerja. Kondisi saat ini peluang lapangan pekerjaan sektor formal memerlukan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah dipenuhi oleh pencari kerja, dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan mereka yang serba terbatas.

Perkembangan ekonomi kota Surakarta sebagaimana yang terjadi pula di kota-kota Indonesia tidak hanya terjadi pada sektor formal saja tetapi juga terjadi pada sektor informal. Kota Surakarta mempunyai sifat dualisme modern formal dengan informal tradisional yang mengandung berbagai macam fungsi yaitu sebagai kota perdagangan, industri, pendidikan, budaya, pemerintahan dan fasilitas sosial dimana setiap fungsi memiliki skala pelayanan yang berbeda-beda.

Perkembangan Kota Surakarta juga diwarnai oleh terjadinya krisis ekonomi Nasional yang dimulai pada tahun 1997 yang meluas menjadi krisis disegala bidang (*multi dimensional*), seperti fundamental perekonomian yang lemah, turunnya nilai mata uang rupiah, tingginya tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, meluasnya berbagai masalah sosial masyarakat, dan berbagai permasalahan yang menyangkut kehidupan semakin terlihat sangat memprihatinkan.

Keadaan ini menimbulkan beberapa permasalahan di kota Surakarta sehingga menimbulkan berbagai dampak yang perlu ditangani dengan seksama. Salah satu aspek yang ditimbulkan oleh kondisi perekonomian nasional adalah meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di kota Surakarta. Salah satu faktor dari meningkatnya jumlah Pedagang Kaki Lima di kota Surakarta merupakan imbas dari meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan peluang lapangan pekerjaan yang

sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu peluang kerja terbatas, terlebih lagi untuk pekerjaan disektor formal memerlukan persyaratan yang tidak mudah diikuti oleh para tenaga kerja yang berpendidikan minim. Dengan demikian banyak tenaga kerja yang beralih sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai salah satu peluang lapangan pekerjaan yang cukup potensial (Widodo, 2000:3).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang tak bisa dilepaskan dari tumbuh kembangnya suatu wilayah. Demikian yang terjadi diwilayah Surakarta, kemerebakan pedagang yang biasa memanfaatkan pinggri jalan raya sama pesatnya dengan perkembangan kota itu sendiri. Sangatlah wajar jika kemudian saat pemerintah berupaya mlakukan penataan kadang-kadang timbul kesalahpahaman (Suara Merdeka, 15 April 2003).

Masalah penataan PKL memang ada dua sisi yang paling bertentangan, ibarat dua sisi mata uang, saat melakukan penataan ada tujuan berbeda dan itu bisa saja bertentangan antara pedagang dan pemerintah. Disatu sisi upaya pemerintah dalam melakukan penataan itu menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat, disisi lain keberadaan PKL itu juga menyangkut tentang nafkah hidup orang yang kemudian tidak bisa begitu saja berhenti. “Sebenarnya kami sadar upaya pemerintah itu bertujuan baik. Ingin kota yang bersih dan teratur. Namun disisi lain keberadaan ini juga untuk mencari nafkah. Dua hal inilah yang harus dipahami dan dicarikan jalan keluar agar tidak saling merugikan di antara keduanya,” kata Sugiman, Bendahara Paguyuban Pedagang Kaki Lima “Sringapono”.

Sementara menurut Warni (Pedagang), sebenarnya tidak ada niatan pedagang untuk membuat kotornya lingkungan. Tujuan awal hanya semata untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarga. “Hanya itu tujuan kami. Kami mohon maaf kepada pihak pemerintah untuk memahami jika kadang-kadang kami sepertinya terlihat ngeyel” kata dia. (Suara Merdeka, 15 April 2003).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) selalu menjadi dilema disetiap wilayah. Pada satu sisi kegiatan ini sumber penghasilan sebagian masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi. Namun pada sisi lain dianggap menjadi “Penyakit” karena mengganggu keindahan dan ketertiban kota (Suara Merdeka, 17 Maret 2003). Sehingga kadang kala membuat perdebatan pro dan kontra dalam penanganannya.

Persoalan PKL seakan-akan tidak pernah bisa tuntas karena pemerintah selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan tidak mudah. Disatu sisi pemerintahan berkewajiban menyediakan lahan pekerjaan bagi warga, disisi lain ketertiban kota dan pemetaan tata guna lahan membutuhkan ketegasan sendiri (Suara Merdeka, 10 April 2003). Simaklah misalnya keluhan Hartati salah satu PKL dijalan simpang yang tidak bisa mengira kiosnya akan dibongkar yang merasa aman karena sudah membayar Rp. 1000/hari. Dia mengaku mengeluarkan Rp. 15 juta untuk membuat warung. “Saya berharap pemerintah kota membantu kami” (Suara Merdeka, 10 April 2003).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kota Surakarta khususnya di kecamatan Laweyan hingga saat ini menurut sebagai besar masyarakat kota Surakarta masih sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan karena lokasinya yang mengambil tempat sangat strategis di berbagai sudut kota. Selain itu produk dan jasa yang ditawarkan sangan kompetitif sementara jenisnya juga sangat bervariasi sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.

Jumlah PKL di Surakarta Tiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah PKL
1	Laweyan	708
2	Serengan	519
3	Pasar Kliwon	426
4	Jebres	501
5	Banjar Sari	1236
Jumlah		3390

Sumber : Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2002.

Jumlah PKL di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

No.	Kelurahan	Jumlah PKL
1	Pajang	104
2	Laweyan	7
3	Bumi	39
4	Panularan	39
5	Penumping	39
6	Sriwedari	96
7	Purwosari	91
8	Sondakan	75
9	Kerten	73
10	Jajar	61
11	Karang Asem	35
Jumlah		708

Sumber : Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Tahun 2002.

Banyaknya jumlah PKL tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi pemerintah kota Surakarta diantaranya :

1. Terganggunya fasilitas umum/prasarana kota.
Dibeberapa tempat dapat dijumpai trotoar yang mestinya untuk pejalan kaki tidak dapat berfungsi karena telah ditempati PKL. Taman Monumen Banjarsari yang seharusnya tempat terbuka sebagai paru-paru kota sekarang sudah penuh dengan PKL klitikan.
2. Terjadinya benturan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK).
Lokasi yang sekarang ditempati PKL tidak sesuai dengan RUTK yang ada. Misalnya di Monumen 45 Banjarsari (Solo Pos, 14 Januari 2003).
3. Dampak lingkungan Perkotaan
Banyaknya PKL yang menempati lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kekumuhan, padahal Surakarta terkenal dengan slogan Berserinya (Bersih, Sehat, Rapi, Indah). Berkembangnya PKL disatu ruas jalan kadang mengganggu arus lalu lintas, misalnya disekitar pasar Klewer.

Pertumbuhan PKL di kota Surakarta merupakan masalah dilematis. Hal ini bersifat dilematis karena menyangkut nafkah masyarakat kecil. Berdasar dari pendapat Kasi Penertiban Kantor Pengelolaan PKL, Bapak Dwi Susteya, SH, salah

satu dilema yang sangat menonjol adalah sebagian PKL banyak yang melanggar ketentuan tentang Penetapan Lahan/Lokasi PKL. Hal ini terlihat dari fasilitas yang dimiliki PKL, mulai dari listrik dengan meteran resmi dari PLN, sumur pompa, juga dari segi bangunannya tidak sedikit dari mereka yang berjualan disitu juga digunakan sebagai tempat tinggal. Di lain pihak, keberadaan PKL yang tidak tertata jelas mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum dalam arti tata kota yang modern. Bahkan untuk mengontrol PKL resmi yang terdaftar dan berizin pun, pemerintah mengalami berbagai kendala.

Melalui berbagai kebijakan dan khususnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dan Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2001 Tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995. Pemerintah Kota Surakarta mencoba untuk menata kembali keberadaan PKL sesuai dengan iklim reformasi dengan melibatkan komunitas dan kelompok PKL tersebut. Tujuan dari diterbitkannya Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 adalah untuk melaksanakannya :

- a. Terjaminnya kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan wilayah kota dengan keterlibatan para pelaku kebijakan.
- b. Terjaminnya usaha masyarakat dalam usahanya sebagai pedagang kaki lima yang mempunyai perijinan secara resmi.
- c. Terjaminnya pemasukan dari retribusi PKL untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi sewa lahan.

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima (PKL) yang tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 1995 ini pelaksanaannya telah diserahkan langsung ke Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta. Pada dasarnya, Perda No. 8 Tahun 1995 ini melarang pedagang kaki lima untuk merombak, menambah, mengubah fungsi, dan fasilitas lokasi pedagang kaki lima yang telah disediakan dan atau ditentukan oleh pemerintah kota, mendirikan bangunan secara permanen di lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, memindah tangankan izin tempat usaha pedagang kaki lima yang telah ditetapkan, serta menempati lahan lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal (hunian). Namun demikian dalam kenyataannya semua ketentuan dan larangan yang ada di atas tidak dipatuhi oleh para pedagang kaki lima walaupun telah diupayakan adanya penegakan hukum dari aparat.

Dalam hal ini peranan Gudang Kalimas (Gabungan Pedagang Kaki Lima Surakarta) Kota Surakarta turut menentukan tujuan akhir dari kebijakan tersebut. Salah satu program pemberdayaan PKL yang melibatkan Gudang Kalimas dengan sekitar 3.000 PKL anggotanya, adalah melakukan penertiban secara mandiri. Berdasarkan keterangan dari Bapak Edy Sanyoto ketua dari Gudang Kalimas dinyatakan bahwa mereka telah berusaha menertibkan anggotanya agar tidak menempati daerah larangan, dan sebenarnya PKL tak butuh tempat yang mewah (Bengawan Pos, 5 Maret 2003). Tetapi, kenyataan di lapangan tidak sedikit para pedagang yang bukan merupakan anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima nekad menempati daerah larangan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah PKL tidak diimbangi dengan pertumbuhan tempat yang tidak memadai.

Sejalan dengan reformas, perilaku dalam masyarakat khususnya di Kota Surakarta mulai berubah. Euforia reformasi yang berlebihan membuat masyarakat

lebih berani bertindak diluar aturan. Bahkan berbagai pelanggaran dilakukan secara terang-terangan, tanpa perasaan takut sewaktu-waktu ditindak. Jika pada masa lalu dapat kita lihat bahwa tidak ada PKL yang berani membuka dasaran di sembarang tempat seperti di atas saluran air atau trotoar jalan protokol maka keadaannya kini dapat bertolak belakang. Seiring dengan krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 1997, kios-kios PKL kini semakin menjamur dimana-mana. Dalam waktu singkat jumlah PKL semakin bertambah dan menambah kekhawatiran dari Pemkot Surakarta.

Ketiadaan pemahaman aturan seperti peraturan-peraturan daerah yang sudah usang yang ditetapkan oleh eksekutif dan legislatif (DPRD) seringkali hanya menjadi perangkat hukum yang hanya dipahami oleh segelintir khalayak masyarakat dengan semakin meningkatnya pelanggaran.

Dengan melihat kondisi yang ada maka apabila subyek tidak ditangani secara sistematis akan mengakibatkan beberapa permasalahan dan konflik yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan kota. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya aturan undang-undang mengenai pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima. Kebijakan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 dan SK Walikota No. 2 Tahun 2001 ini dikeluarkan seiring dengan melihat latar belakang secara umum kondisi nasional Indonesia yang tidak begitu baik dan kondisi Kota Surakarta pada khususnya.

Beberapa kasus seperti penyalahgunaan lahan dan penyerobotan ruang publik yang pada perencanaan awalnya tidak diperuntukkan untuk usaha PKL misalnya trotoar yang berfungsi untuk jalan kaki serta tempat-tempat yang sudah mempunyai peruntukan sebagai sarana perkotaan seperti bahu jalan, jembatan penyeberangan, taman dan lain-lain. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri diperkotaan seperti terganggunya pejalan kaki, bahkan pada daerah-daerah tertentu dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan terganggunya kebersihan dan keindahan kota.

Sementara kasus lainnya adalah pendirian bangunan untuk lokasi usaha PKL di tempat terlarang dan tidak mengindahkan aspek lingkungan sekitarnya dengan mendirikan bangunan permanen secara liar. Hal ini juga sangat merugikan lingkungan kota, sebagai contoh pembangunan kios-kios PKL di atas saluran air pada suatu waktu akan menjadi bencana dengan tidak terkontrolnya saluran air akibat tertutupnya saluran tersebut dengan lantai bangunan PKL. Dengan demikian, tidak efektifnya Perda No. 8 / 1995 akan berdampak negatif pada masalah kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan kota.

Oleh karena itu setelah melihat latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai keberhasilan Implementasi Perda No. 8 Tahun 1995 guna mencari alternatif dan solusi kebijakan Perda dalam mengatasi sektor informal Pedagang Kaki Lima untuk menambah wawasan dalam konteks kebijakan publik di Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal (Ferdinand, 2002, p. 25) yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian kausal adalah mengidentifikasi hubungan sebab akibat antar variabel, mencari tipe sesungguhnya dari fakta untuk membantu memahami dan memprediksi hubungan, menetapkan pendekatan kausal dari kejadian-kejadian yang berurutan, dan mengukur variasi antara penyebab yang diduga dan akibat yang diduga. Tujuan penelitian kausal adalah untuk mengembangkan model hipotesis-hipotesis yang ada. Sehingga dari model penelitian yang dikembangkan ini, diharapkan dapat menjelaskan hubungan sebab dan akibat antar variabel yang bertujuan memberikan kegunaan dalam bidang kebijakan publik. Dengan demikian, apabila hubungan kausal antara variabel-variabel dalam penelitian ini melalui pengujian hipotesis, maka penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian penjelasan (*explanatory research*) (Singarimbun, 1995, p.5). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam Perda No, 8 tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyangkut aspek kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan kota di wilayah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

Karena kesimpulan data sampel digunakan untuk mengambil kesimpulan populasi, maka penentuan sampel perlu dilakukan. Populasi penelitian ini mengambil sampel warga masyarakat yang bergantung hidupnya sebagai pedagang kaki lima (PKL) di sektor informal di daerah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini masih dalam cakupan ilmu administrasi publik dengan fokus penelitian kepada analisis terhadap implementasi kebijakan Perda Pemerintah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 tentang Penanganan penataan PKL. Dengan faktor-faktor yang mempengaruhi yang meliputi :

1. Kondisi Lingkungan (X_1)
2. Komunikasi (X_2)
3. Perilaku Pelaksana (X_3)

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kota Surakarta dilakukan di Wilayah Kecamatan Laweyan.

Alasan Kecamatan Laweyan dipilih sebagai lokasi penelitian adalah :

1. Kecamatan laweyan merupakan wilayah yang strategis bagi PKL di Surakarta.
2. Bila dilihat dari jenis usaha, jenis tempat usaha dan waktu operasional PKL, maka karakteristik tersebut cukup representatif dalam mewakili penelitian ini
3. Tersedianya data PKL yang diperlukan dalam penelitian.
4. Terdapatnya sentra keiatan kota dan sebagai pusat kegiatan publik yang vital.
5. Kecamatan Laweyan sebagai pintu gerbang di sebelah barat kota Surakarta.

D. Variabel Penelitian

1. Klasifikasi Variabel
 - a. Variabel bebas (X)
 - Kondisi lingkungan (X_1)
 - Komunikasi (X_2)
 - Perilaku pelaksana (X_3)
 - b. Variabel tergantung
Implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kota Surakarta.
2. Definisi Konseptual :
Definisi konseptual masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Implementasi Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah tertentu.
 - b. Kondisi Lingkungan adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan masyarakat lokasi implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995.
 - c. Komunikasi suatu proses yang meneruskan pesan-pesan kebawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya melalui aspek transmisi, konsistensi dan kejelasan.
 - d. Perilaku Pelaksana adalah suatu hasil dari interaksi pelaksana kebijakan Perda No. 8 tahun 1995 tentang Penataan dan Pemninaan Pedagang Kaki Lima di Surakarta terhadap objek kebijakan Pedagang Kaki Lima (PKL).
3. Definisi Operasional
Salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi dalam penelitian adalah definisi operasional, yang merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian maka dapat diketahui pengukuran baik buruknya suatu variabel.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

- a. Implementasi Kebijakan dengan menggunakan indikator :
 - 1) Tingkat Keberhasilan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
 - 2) Tingkat keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima
 - 3) Tingkat keberhasilan penertiban Pedagang Kaki Lima
 - 4) Tingkat keberhasilan kegiatan penyuluhan
 - 5) Tingkat keberhasilan kegiatan pembimbingan
 - 6) Tingkat keberhasilan kegiatan memfasilitasi program kemitraan.
 - 7) Tingkat keberhasilan kegiatan inventarisasi masalah-masalah untuk pemecahan masalah.
 - 8) Tingkat keberhasilan kegiatan mendesain dasaran PKL.
 - 9) Tingkat keberhasilan kegiatan penempatan zona PKL.
 - 10) Tingkat keberhasilan kegiatan memungut retribusi PKL
 - 11) Tingkat keberhasilan kegiatan menindak pelanggaran kebijakan.
- b. Kondisi Lingkungan PKL dapat diindikasikan dengan :
 - 1) Tingkat kebersihan lingkungan PKL.
 - 2) Tingkat keindahan lingkungan PKL

- 3) Tingkat ketertiban dan keamanan Lingkungan
 - 4) Tingkat kelestarian lingkungan kota.
 - 5) Tingkat keramaian lingkungan
 - 6) Tingkat kerawanan lalu lintas
 - 7) Tingkat kerawanan kejahatan
 - 8) Tingkat keramahan warga.
- c. Komunikasi dengan menggunakan indikator :
- 1) Tingkat pemahaman terhadap keputusan kebijakan.
 - 2) Tingkat keakuratan dan kecermatan keputusan kebijakan sebelum implementasi kebijakan.
 - 3) Tingkat kemampuan pelaksanaan kebijakan.
 - 4) Tingkat pemahaman terhadap petunjuk pelaksanaan kebijakan.
 - 5) Tingkat kejelasan tujuan kebijakan.
- d. Perilaku Pelaksana dengan menggunakan indikator :
- 1) Tingkat dukungan pelaksana terhadap kebijakan.
 - 2) Tingkat tanggung jawab pelaksana terhadap kebijaksanaan.
 - 3) Tingkat pelaksanaan kewajiban pelaksana pada saat implementasi kebijakan.
 - 4) Tingkat kewenangan pelaksana pada saat implementasi kebijakan.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan pada analisis data adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer berasal dari Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta dan Kantor Kecamatan Laweyan yang antara lain terdiri dari data jumlah PKL, hasil pengamatan langsung, jumlah penduduk, tingkat penghasilan rata-rata, dan data-data lain yang menyangkut PKL.
2. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, serta berbagai sumber relevan lain seperti Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Walikota Surakarta 2002 kepada DPRD kota Surakarta mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dengan skala ordinal. Kuesioner sebagai suatu instrumen penelitian utama dengan menggunakan pertanyaan secara terstruktur baik dengan metode tertutup maupun secara terbuka. Instrumen penelitian ini mempunyai suatu pedoman atau tata cara sebagai petunjuk dalam mengajukan pertanyaan yang akan diajukan yang akan dinilai dengan suatu skor.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skala ordinal dari Likert dengan catatan :

“Semakin tinggi nilai atau score merupakan indikasi sikap positif sedangkan nilai yang rendah menunjukkan sebaliknya”.

Skala pengukuran likert tersebut bertujuan untuk mengukur konsep yang telah dirumuskan pada jenjang ordinal menggunakan seperangkat indikator. Jadi skala pengukuran merupakan kegiatan pemberian nilai atau score yang merupakan angka

pada jawaban atas pertanyaan oleh responden untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pengujian hipotesa. Dengan demikian penilaian *total score* bagi setiap responden.

Dalam memberikan penilaian terhadap jawaban penilaian dalam jawaban responden tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nilai 1 untuk jawaban tidak mendukung/tidak setuju
2. Nilai 2 untuk jawaban kurang mendukung/kurang setuju
3. Nilai 3 untuk jawaban mendukung/setuju
4. Nilai 4 untuk jawaban sangat mendukung/setuju.

G. Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh PKL yang berjumlah 708, yang mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang kaki lima (PKL) di sektor informal di Kecamatan Laweyan kota Surakarta.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Mengingat populasi yang diteliti jumlahnya begitu besar dan tersebar di beberapa tempat keterbatasan biaya, waktu, dan tenaga maka dalam memperoleh data untuk penelitian ini digunakan suatu cara sampling.

Ada berbagai rumus yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya sampel yang menghitung besarnya sampel yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini untuk menentukan besarnya sampel dengan menggunakan table dan Nomogram. Tabel yang digunakan adalah table Krejcie dan Nomogram Hary King. Dengan cara tersebut penulis tidak mempergunakan perhitungan yang rumit. (Sugiyono, h. 64). Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5 % jadi sampel yang diperoleh mempunyai tingkat kepercayaan 95 % terhadap populasi.

Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan populasi di Kecamatan Laweyan adalah 708 PKL. Bila tingkat kesalahan 5 % maka jumlah sampelnya sebanyak 248 PKL. (Tabel Krejcie, Sugiyono hal. 65).

Karena populasi dalam penelitian ini bersrata maka jumlah sampelnya juga harus bersrata menurut jumlah PKL ditiap-tiap Kelurahan harus proporsional sesuai dengan populasi.

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pedagan Kaki Lima (PKL) yaitu pedagang yang melaksanakan kegiatan ekonomi yang dilakukan pada suatu tempat umum yang sebenarnya dimaksudkan bukan untuk kegiatan usaha seperti ditrotoar jalan, di taman kota. Dan sebagainya (Direktori PKL, 2002) di wilayah Kecamatan Laweyan Surakarta. Menurut hasil pendataan PKL yang dilakukan Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta yang tercatat pada buku Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta 2002, menyebutkan bahwa jumlah seluruh usaha PKL yang dapat tercakup dalam pendataan tersebut sebanyak 3390 yang tersebar di 5 (lima) kecamatan sebagai berikut : 708 usaha di Kecamatan Laweyan, 519 usaha di Kecamatan

Seregan, 426 di Kecamatan Pasar Kliwon, 501 di Kecamatan Jebres, dan 1236 usaha di Kecamatan Banjarsari. Responden dalam penelitian ini meliputi semua jenis tempat usaha, waktu operasional usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Kecamatan Laweyan, Surakarta terdiri dari 11 kelurahan, yaitu Kelurahan Pajang, Laweyan, Bumi, Panularan, Penumping, Sriwedari, Purwosari, Sondakan, Kerten, Jajar, Karangasem. Seperti pada penentuan Jumlah Sampel bahwa dari 708 populasi ditentukan menjadi 248 PKL pada Tabel III.2.

Karena populasi masing-masing kelurahan berbeda maka besarnya responden juga mengalami perbedaan. Untuk penentuan responden yang akan diberi daftar pertanyaan pada populasi, maka peneliti melakukan undian tiap-tiap populasi PKL dari 11 (sebelas) kelurahan sehingga didapatkan 248 responden.

Setelah didapatkan daftar responden, maka peneliti memberikan daftar pertanyaan pada 248 responden seperti daftar responden yang ada. Setelah diperkirakan waktu yang cukup untuk mengisi daftar pertanyaan, maka peneliti mengambil daftar pertanyaan. Dari 248 daftar pertanyaan yang disampaikan pada responden, yang mengembalikan sebanyak 240 responden (96,8 %), terdapat 8 responden (3,2 %) yang tidak mengembalikan daftar pertanyaan dengan berbagai alasan seperti ada yang hilang, lupa menaruh, tertinggal dirumah, rusak kehujaan dan sebagainya, sehingga yang dapat diolah sebanyak 240 responden.

Setelah diketahui gambaran responden, maka selanjutnya akan di analisa jawaban dari 240 responden yang telah mengisi dan menyerahkan daftar pertanyaan kepada penulis. Deskripsi ini menyajikan hasil kuesioner dari responden PKL Kecamatan Laweyan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi tiap-tiap indikator, untuk mengetahui persentase tanggapan PKL terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan penataan, pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kecamatan Laweyan Surakarta.

Untuk mengetahui atau rendahnya skor penilaian dari masing-masing variabel, maka diperlukan kriteria interval atas jawaban responden. Nilai interval tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana.

2. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 (Variabel Y)

Untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan diperlukan maksud dari implementasi kebijakan itu sendiri, yang dimaksud implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan tertentu untuk memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan implementasi digunakan cara membandingkan antara data empiris dengan data teoritis. Data empiris dengan data teoritis. Data empiris adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan seperti pada jumlah data dari responden. Pengukuran keberhasilan

implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 dilakukan dengan pemberian nilai pada indikator pembinaan, penataan, penerbitan, penyuluhan, kemitraan, inventarisasi, masalah, desain, dasaran, dan penempatan zona.

B. Uji Hipotesis

Seperti diuraikan pada tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis yaitu untuk mengetahui apakah kondisi lingkungan, komunikasi dan perilaku pelaksana berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Di Kecamatan Laweyan Surakarta.

Untuk mengetahui hubungan variabel terikat dan variabel bebas diperlukan pengujian kedua variabel. Dari hasil penghitungan kategori variabel implementasi kebijakan, kondisi lingkungan, dan perilaku pelaksana bila hasil jawaban responden dari variabel bebas akan mengetahui berapa tingkat hubungan variasi jawaban pada kedua variabel tersebut.

1. Uji Hipotesis Minor Pertama

Hubungan silang dari implementasi kebijakan dengan kondisi lingkungan tersebut sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 1
HUBUNGAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN DENGAN KONDISI
LINGKUNGAN

Variabel	KONDISI LINGKUNGAN				
	Kategori	R	S	T	Jml
Implementasi Kebijakan	R	9 (3,8%)	61 (25,4%)	0 (0%)	70 (29,2%)
	S	26 (10,8%)	53 (22,1%)	11 (4,6%)	90 (37,5%)
	T	1 (0,4 %)	41 (17,1%)	38 (15,8%)	80 (33,3%)
	Jml	36 (15%)	155 (64,4%)	49 (20,4%)	240 (100%)

Keterangan : R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi.

Tabel di atas ditafsirkan, bahwa dari 240 responden (100%) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah dan kondisi lingkungan rendah sebanyak 9 (3,8%) responden, sedangkan yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah tetapi kondisi lingkungan sedang sebanyak 61 (25,4%) responden, dan tidak ada 0 (0%) responden yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah tetapi kondisi lingkungan tinggi.

Responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang tetapi kondisi lingkungan pada kategori rendah sebanyak 10,8%, adapun yang menyebutkan implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sebanyak 22,1 %, dan yang

menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan juga menyebutkan kondisi lingkungan kategori tinggi sebanyak 4,6%.

Responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta pada kategori tinggi dan kondisi lingkungan kategori rendah 1 responden (0,4%), sedangkan yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No.8 Tahun 1995 kategori tinggi dan kondisi lingkungan kategori sedang sebanyak 41 responden (17,1%), tetapi terdapat 15,8% responden yang menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan kondisi lingkungan tempat PKL beroperasi pada kategori tinggi.

Dari hasil tabel silang pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan variabel implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan variabel kondisi lingkungan terdapat hubungan yang bervariasi. Persentase terbesar terlihat pada hubungan antara implementasi kebijakan rendah dan kondisi lingkungan kategori sedang yaitu sebesar (61 (25.4%). Akan tetapi terbesar kedua pada responden 22,1% yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sedang, dan implementasi kebijakan yang menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dan kondisi lingkungan pada kategori sedang, dan implementasi kebijakan yang menyebutkan rendah sebanyak 36 responden (15%). Dan yang menyatakan kondisi lingkungan rendah sebesar 70 responden 29,2%. Hal ini menggambarkan kedua variabel tersebut perlu ditingkatkan untuk memperbaiki implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Penelitian ini berasumsi bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kondisi lingkungan dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{x1y} = 0.523$, nilai ini bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel Product Moment N 240 tingkat kesalahan (α) 0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara kondisi lingkungan dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan “Ada pengaruh yang positif antara kondisi lingkungan di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995” diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel kondisi lingkungan meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya bila variabel kondisi lingkungan menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan.

2. Uji Hipotesis Minor Kedua

Sebagaimana dalam tujuan penelitian yang berkeinginan untuk mengetahui gambaran dari implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi, maka dari hasil kategori implementasi kebijakan dan kategori

komunikasi disilangkan dan mendapatkan gambaran sebagaimana tercantum dalam berikut ini :

Tabel 2
HUBUNGAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN DENGAN KOMUNIKASI

Variabel	KOMUNIKASI				
	Kategori	R	S	T	Jml
Implementasi Kebijakan	R	26 (10,8%)	42 (17,5%)	2 (0,8%)	70 (29,2%)
	S	9 (3,8%)	62 (25,8%)	19 (7,9%)	90 (37,5%)
	T	1 (0,4 %)	30 (12,5%)	49 (20,4%)	80 (33,3%)
	Jml	36 (15%)	134 (55,8%)	70 (29,2%)	240 (100%)

Keterangan : R= Rendah, S = Sedang, T = Tinggi

Tabel di atas dapat digambarkan bahwa dari dua ratus empat puluh responden terdapat 10,8% menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi pada kategori rendah, 17,5 % menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori rendah, dan komunikasi kategori sedang, dan hanya 0,8 % responden yang menyatakan komunikasi kategori tinggi dan kategori implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah.

Pada tabel di atas didapatkan 3,8% responden menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan komunikasi kategori rendah, adapun yang menyatakan implementasi kebijakan dan komunikasi pada kategori sedang sebanyak 25,8%, dan 7,9% responden menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori sedang dan komunikasi pada kategori tinggi.

Ditemukannya 1 responden (0,4%) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori tinggi dan komunikasi pada kategori tinggi, adapun yang menyatakan implementasi kebijakan pada kategori tinggi dan komunikasi pada kategori sedang sebanyak 12,5%, tetapi terdapat 20,4% responden yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi pada kategori tinggi.

Hasil di atas menggambarkan bahwa hubungan antara implementasi kebijakan dan komunikasi sebagian besar berada pada kategori sedang yaitu 25,8%. Sedangkan pada kategori rendah antara implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi sebesar 10,8%, dan yang menyatakan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan komunikasi tinggi sebesar 20,4%. Dari angka-angka yang cukup bervariasi tersebut yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota yaitu pada kategori implementasi kebijakan dan komunikasi rendah. Dengan meningkatkan kejelasan kebijakan, meningkatkan kesesuaian kebijakan

dengan realitas di lapangan, meningkatkan kemampuan pelaksana dari atas sampai bawah sehingga komunikasi kebijakan lancar pada saat implementasi.

Penelitian ini juga mengasumsikan adanya pengaruh positif antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik Korelasi Product Moment didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{x_2y} = 0.712$, nilai tersebut bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel Product Moment N 240 tingkat kesalahan (α) 0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan “Ada pengaruh yang positif antara komunikasi di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995” diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel komunikasi meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami peningkatan dan sebaliknya bila variabel komunikasi menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan. Sedangkan dinyatakan signifikan karena r hitung setelah dikonsultasikan lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi 0.05 dengan jumlah responden 240.

3. Uji Hipotesis Minor Ketiga.

Demikian pula untuk mengetahui hubungan implementasi kebijakan dan perilaku pelaksana diperlukan penyilangan dari dua kategori variabel implementasi kebijakan dengan perilaku pelaksana. Hubungan tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
HUBUNGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DENGAN PERILAKU PELAKSANA

Variabel	PERILAKU PELAKSANA				
	Kategori	R	S	T	Jml
Implementasi Kebijakan	R	55 (22,9%)	15 (6,25%)	.0 (0%)	70 (29,2%)
	S	25 (10,4%)	65 (27,1%)	0 (0%)	90 (37,5%)
	T	5 (2,1 %)	62 (25,8%)	13 (5,4%)	80 (33,3%)
	Jml	85 (35,4%)	142 (59,2%)	13 (5,4%)	240 (100%)

Keterangan : R= Rendah, S = Sedang, T = Tinggi.

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 240 responden (100%), yang menyatakan perilaku pelaksana dan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 rendah sebesar 22,9%. Adapun yang menyatakan perilaku

pelaksana kategori sedang dan implementasi kebijakan kategori rendah sebesar 6,25%. Bahkan yang menyatakan implementasi kebijakan kategori rendah dan perilaku pelaksana rendah tidak ada (0%).

Penilaian responden yang menyebutkan implementasi kebijakan pada kategori sedang dan perilaku pelaksana kategori rendah sebesar 10,4 %, dan terdapat 27.1% responden menyebutkan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan perilaku, pelaksana pada kategori sedang, sedangkan tidak ada 0% yang menyebutkan implementasi kebijakan pada kategori sedang dan perilaku pelaksana pada kategori tinggi.

Penilaian tentang implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 pada kategori tinggi dan perilaku pelaksana pada kategori rendah hanya 2,1 %. Adapun yang menilai implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 tinggi dan perilaku pelaksana sedang sebanyak 25,8%. Dan penilaian implementasi kebijakan tinggi dan perilaku pelaksana tinggi hanya 5,4 %.

Hasil tabel silang di atas menggambarkan bahwa hubungan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dengan perilaku pelaksana sangat erat, karena bila dilihat penilaian responden implementasi kebijakan dan perilaku pelaksana rendah sebesar 22,9%. Dan penilaian sedang terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 dan kategori rendah terhadap perilaku pelaksana sebanyak 10,4%. Sehingga perilaku pelaksana sangat berhubungan erat dan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995, karena bila perilaku pelaksana tinggi, maka implementasi kebijakan akan tinggi pula.

Asumsi adanya pengaruh positif antara komunikasi dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan perlu dibuktikan dengan pengujian hipotesis.

Setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan menggunakan teknik Korelasi *Product Moment* didapatkan nilai koefisien korelasi sebesar $r_{xy} = 0.693$, nilai tersebut bila dikonsultasikan dengan nilai kritis pada tabel Product Moment N 240 tingkat kesalahan (α) 0.05 didapatkan nilai 0.128 sehingga diartikan $r_{hitung} > r_{tabel}$, dengan demikian ditemukan adanya korelasi antara perilaku pelaksana dengan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995. Pernyataan hipotesis kerja yang menyebutkan “Ada pengaruh yang positif antara perilaku pelaksana di Kecamatan Laweyan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995” diterima. Hubungan tersebut dinyatakan positif artinya bila variabel perilaku pelaksana meningkat, maka implementasi kebijakan juga akan mengalami variabel perilaku pelaksana menurun, maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami penurunan. Sedangkan dinyatakan signifikan karena r hitung setelah dikonsultasikan lebih besar dari r tabel dengan taraf signifikansi 0.05 dengan jumlah responden 240.

4. Uji Hipotesis Mayor

Pernyataan hipotesis mayor yang menyebutkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kondisi lingkungan, komunikasi, dan perilaku pelaksana terhadap implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan Laweyan setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis tersebut dengan

menggunakan koefisien korelasi ganda (R) didapatkan hasil koefisien determinasi (R^2) = 0,662 artinya variasi pada implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 ditentukan oleh variasi kondisi lingkungan(XI), komunikasi (X2), perilaku pelaksana (X3) sebesar 66.2%.

Untuk menghitung $R = \sqrt{R^2} = \sqrt{0,662} = 0,8147$, hasil ini lebih besar bila dikonsultasikan dengan tabel r dengan taraf signifikansi 5% dan $N = 240$ diperoleh nilai kritis sebesar 0,128, sehingga dapat disimpulkan “Ada pengaruh yang signifikan antara Kondisi Lingkungan, Komunikasi dan Perilaku Pelaksana terhadap keberhasilan Implementasi Perda No. 8 Tahun 1995”.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Sebagaimana disebutkan Van Meter dan Van Horn dalam buku Wibawa (1994 : 19-21) adanya enam variabel untuk mengetahui hasil suatu kebijakan. Enam variabel tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi, karakteristik birokrasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan sikap pelaksana.

Pada penelitian ini mengadopsi dari teori pokok di atas dengan memodifikasi variasi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Kondisi Lingkungan, Komunikasi, dan Perilaku Pelaksana. Kondisi lingkungan kebijakan yang meliputi : kondisi sosial, ekonomi dan politik, komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi antar organisasi, dan Perilaku Pelaksana diturunkan dari Sikap Pelaksana.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uji hipotesis dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995, yang menyebutkan faktor kondisi lingkungan berada pada kategori sedang karena dari 240 responden (100%) paling besar 155 responden (64.6%) menjawab pada kategori cukup, faktor komunikasi pada kategori cukup lancar dengan alasan dari 240 responden (100%) sejumlah 134 responden (55.8%) menjawab pada kategori cukup lancar, dan faktor perilaku pelaksana juga pada kategori sedang karena didapatkan jawaban dari 240 responden (100%), ada 142 responden (59.2%) yang menjawab dikategorikan cukup baik. Dan pada variabel tergantung implementasi kebijakan juga dikategorikan sedang karena dari 240 responden (100%) ditemukan 90 responden (37.5%) menjawab pada kategori cukup berhasil.

Kategori implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh jawaban responden yang tampak pada tabel tunggal masing-masing butir pertanyaan yang ditampilkan dan diuraikan sebelumnya. Penilaian yang sangat menonjol baik pada keadaan positif maupun negatif adalah pada indikator pembinaan jawaban responden cenderung kearah positif sedangkan indikator penataan cenderung ke arah negatif seperti pelaksanaan penataan PKL penilaian tertinggi pada kadang-kadang dilakukan penataan. Cara yang dilakukan oleh Seksi penataan PKL Pemerintah Kota Surakarta terhadap PKL juga dirasakan kurang tepat karena penilaian tertinggi pada jawaban kurang tepat. Demikian pula pada sifat penataan dan manfaat penataan menurut responden sifat penataan yang dilakukan cenderung relatif tidak menyenangkan PKL dan cenderung tidak bermanfaat bagi PKL.

Dari tujuh butir pertanyaan indikator penyuluhan responden merasakan bermanfaat karena setelah mendapatkan penyuluhan dan pembimbingan

merasakan usahanya meningkat dan dapat berlangsung cukup baik. Bahkan yang sangat dirasakan keuntungannya adalah meningkatnya jumlah kemitraan dalam usaha dan kelangsungan kemitraan itu dalam kegiatan usahanya.

Kecenderungan ke arah negatif ditemukan pada penempatan zona larangan PKL karena responden menyebutkan cukup patuh tetapi responden yang lain lebih banyak memilih pada jawaban tidak patuh, hal ini dikarenakan peneraan sanksi yang diberikan pada PKL pelanggar zona larangan cenderung relatif kurang tegas.

Hasil tabel tunggal pada indikator variabel kondisi lingkungan menunjukkan pada interpretasi bahwa responden cenderung menilai kearah positif seperti diantaranya tingkat kerjasamanya dalam mewujudkan kebersihan lingkungan, kenyamanan lingkungan, keamanan lingkungan cukup bisa kerjasama yang baik. Demikian pula pada kemacetan lalu lintas dan terjadinya kecelakaan lalu lintas di lingkungan PKL responden menilai kearah positif, bahkan pada pertanyaan tentang persetujuan dan keramahan warga setempat terhadap usaha yang dilakukan PKL, responden menjawab paling tinggi setuju dan ramah dan bila dilihat frekuensi jawaban responden cenderung ke arah sangat setuju dan sangat ramah.

Sedangkan pada variabel komunikasi, bila dilihat dari tabel tunggal masing-masing butir pertanyaan secara keseluruhan jawaban responden relatif cukup lancar tetapi menurut peneliti jawaban responden cenderung kearah tidak lancar karena terdapat butir-butir jawaban responden selain yang menyatakan cukup, paling tinggi kedua adalah kurang. Seperti diantaranya pemahaman PKL terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 bila dibandingkan responden yang menjawab tidak paham ditambah yang kurang paham dengan yang menjawab paham dan sangat paham persentasenya banyak yang menjawab tidak paham dan kurang paham yaitu sebesar 57.1%. Pada item pernyataan dalam indikator komunikasi juga ditanyakan bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada penerima pesan dalam implementasi kebijakan. Pertanyaan tentang bagaimana kemampuan pelaksana penyuluhan, pembinaan, penertiban, dalam melaksanakan tugasnya. Responden menjawab paling tinggi pada kategori cukup mampu, tetapi cenderung ke arah negatif atau tidak mampu. Demikian juga pada tingkat kejelasan yang diterima oleh penerima pesan yaitu PKL, responden menyebutkan paling tinggi pada kategori jelas, tetapi kategori tertinggi kedua pada kurang jelas dan tidak jelas.

Variabel perilaku pelaksana pada kategori cukup baik meskipun kecenderungan pada kategori buruk seperti ditunjukkan pada tabel VI.60, yang menyebutkan pada kategori baik hanya 13 dari 240 responden tetapi yang menyebutkan pada kategori buruk sebanyak 85 dari 240 responden.

Seperti ditunjukkan pada tabel tunggal dari masing-masing butir pertanyaan pada indikator perilaku pelaksana yang memperlihatkan kategori cukup baik tetapi kecenderungan ke arah negatif, diantaranya pada butir pertanyaan tentang ketepatan waktu pertanyaan tentang ketepatan waktu kedatangan petugas penyuluhan, keseriusan penyuluhan, keseriusan penertiban, keseriusan pembinaan, kejujuran, penertiban, kejujuran penarikan retribusi dan tindakan sanksi pelanggar ketertiban. Terlihat paling menonjol pada butir pertanyaan

tentang ketepatan waktu kedatangan petugas penyuluhan dan keseriusan pembinaan kecenderungan relatif negatif.

Hasil uji regresi dalam penelitian ini didapatkan persamaan secara statistik dapat $Y = -11.0 + 1.73 X_1 + 1.58 X_2 + 1.14 X_3$, persamaan tersebut dapat diartikan hubungan pengaruh antara kondisi lingkungan, komunikasi perilaku pelaksana, dengan keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan signifikan secara statistik.

Persamaan regresi di atas dapat diartikan koefisien variabel kondisi lingkungan sebesar 1.73 artinya bila variabel kondisi lingkungan naik 1 (satu) "unit" maka variabel implementasi kebijakan akan mengalami peningkatan sebesar 1.73. Pada koefisien variabel komunikasi sebesar 1.58. Dan pada koefisien variabel perilaku pelaksana sebesar 1.14 berarti bila variasi perilaku pelaksana naik satu "unit", maka implementasi kebijakan akan meningkat sebesar 1.14.

Sumbangan relatif pada variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan sebesar 25% dari $R^2 = 0.662$ (100%).

Sumbangan relatif pada variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan sebesar 22% dari $R^2 = 0.662$ (100%).

Hasil perhitungan sumbangan efektivitas diketahui hasil besarnya sumbangan atau kontribusi masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat :

1. Sumbangan variabel kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 16,68%.
2. Sumbangan variabel komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 35,13%.
3. Sumbangan variabel perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan adalah sebesar 14,41%.
4. Hasil perhitungan sumbangan efektif (SE) di atas kondisi lingkungan menyumbang 16,68%, komunikasi menyumbang 35,13%, perilaku pelaksana menyumbang 14,41%, apabila dijumlah sebesar 66,22% adalah kontribusi ketiga variabel dalam penelitian ini. Adapun sisanya sebesar 33,78% ditentukan oleh variabel lain.
5. Berdasarkan hasil di atas terlihat bahwa komunikasi paling berpengaruh sangat signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengujian hipotesis dengan taraf kesalahan 0,05 pada hipotesis minor pertama yaitu pengaruh kondisi lingkungan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.523$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N = 240$ yang berarti signifikan pada taraf kesalahan 0,05; maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada pengaruh yang signifikan antara variabel kondisi lingkungan dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” **diterima**.
2. Pengujian hipotesis minor kedua yaitu pengaruh komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.712$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N = 240$ yang berarti signifikan yang tinggi pada taraf kesalahan 0,05; maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada hubungan yang signifikan antara variabel komunikasi dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” **diterima**.
3. Pengujian hipotesis minor ketiga yaitu pengaruh perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan dengan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0.693$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $N = 240$ yang berarti signifikan pada taraf kesalahan 0,05; maka hipotesis kerja yang berbunyi : “ada hubungan yang signifikan antara variabel perilaku pelaksana dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan” dapat **diterima**.
4. Pengujian hipotesis mayor yaitu pengaruh kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, dengan hasil perhitungan $r_{hitung} = 0,814$ adalah lebih besar $r_{tabel} = 0,128$ $n = 240$ taraf signifikan 5% yang berarti signifikan, “ada pengaruh yang signifikan antara variabel kondisi lingkungan, dengan variabel keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 di Kecamatan” dapat **diterima**.
5. Hasil hitung koefisien korelasi determinasi (R^2) = 66.22% artinya variasi didalam variabel keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana sebesar 66.22%
6. Dari 66.22% tersebut variabel kondisi lingkungan menyumbang sebesar 16,68% variabel komunikasi menyumbang 35,13% variabel perilaku pelaksana 14,41%, adapun sisanya sebesar 33,78% ditentukan oleh variabel lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis ajukan saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan para pengambil keputusan di Pemerintah Kota Surakarta.

Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setelah diketahui hasil jawaban responden tentang keberhasilan implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan, diperlukan perbaikan pada sistem penataan PKL, tata cara pelaksanaan PKL agar PKL merasakan kemanfaatan yang cukup tinggi.

Termasuk juga perlunya penerapan sanksi dilakukan secara tegas karena PKL merasa tidak patuh apabila pelanggaran zona larangan tidak ditindak secara tegas.

2. Peningkatan pemeliharaan pada kondisi lingkungan tempat PKL beroperasi karena tingkat kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas perlu dijaga.
3. Pada faktor komunikasi perlu peningkatan pemahaman bagi para pelaksana terhadap Perda No. 8 Tahun 1995 untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan isi peraturan, dan penerima pesan dalam hal ini PKL mendapatkan kejelasan tentang Perda No. 8 Tahun 1995.
4. Perlunya peningkatan perilaku pelaksana yakni peningkatan kemampuan pada aspek pembinaan, penataan dan penertiban seperti pada ketepatan waktu, kesesuaian pelaksana, keseriusan, dan kejujuran pelaksana.
5. Karena keterbatasan penelitian ini maka diperlukan penelitian yang lebih lanjut karena hasil penelitian ini menyebutkan variabel kondisi lingkungan, komunikasi, perilaku pelaksana hanya menyumbang sebagian dari variabel implementasi kebijakan Perda No. 8 Tahun 1995 Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Candrakirana, Kamala dan Isono Sadoko. 1995. *Dinamika Ekonomi Informal di Jakarta*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Edisi Pertama, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Diponegoro, Universitas. 2001. *Buku Pedoman Penyusunan Tesis*, Program Pasca Sarjana Program Administrasi Konsentrasi Administrasi Publik Undip Semarang.
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Direktori Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta 2002 (Hasil Pendataan PKL Tahun 2002), Kantor Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Surakarta.
- Firadausy, Carunia Mulya, 1995. (Penyunting). *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Diperkotaan*, Dewan Riset Nasional, Jakarta.
- Gibson, Ivancevich. 1996. *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Henry, Nicolas. 1995. *Administrasi Negara Dan Masalah-Masalah Publik*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Islamy, M Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Penerbit PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer. 1996 (Penyunting), *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Kota*. Yayasan Obor. Jakarta.
- P. robbin, Stephen. 1996. *Perilaku Organisasi*, PY. Prentice Hall A. Simon & Schuster Company. New Jersey.
- Pace, R. Wayne, F Faules, Don. *Komunikasi Organisasi*. PT. Remaja Rosda Karya Bandung.
- Samudra Wibawa, Yuyun Purbakusumo, Agus Pramusinto. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugiyono. 2000. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Kedua, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.

Thoha, Miftah. 2000. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Fispol UGM. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wahab, Solicin Abdul. 1997. *Analisis Kebijakan Negara Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Penerbit Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo Yogyakarta.

B. Surat Kabar

Bengawan Pos, 4 Maret 2003
Suara Merdeka, 15 April 2003
Suara Merdeka, 17 April 2003
Suara Merdeka, 10 April 2003
Solo Pos, 26 Februari 2003
Solo Pos, 8 Februari 2003
Solo Pos, 14 Januari 2003

C. Peraturan-Peraturan dan Perundangan

Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 41 Tahun 2001 Tentang Pedoman Uraian Tugas Kantor Pengelolaan PKL Kota Surakarta.

Surat Keputusan Walikota Surakarta No. 511/305/111/1/ 2001 Tentang Pembentukan Tim, Penataan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima dan Tim Operasi Lapangan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 8 Tahun 1995 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.

Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 5 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

D. Tesis

Navvarone, Okki. 2002. *Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku PKL Terhadap Perda No. 11 Tahun 2000 di Kecamatan Semarang Tengah*, Tesis. Program Studi Magister Administrasi Publik. Undip. Semarang.

Sudewa, 2001, *Pengaruh Pedagang Kaki Lima Terhadap Kualitas Lingkungan Fisik Kawasan Monumen Perjuangan 45 Surakarta*, Tesis. Magister Teknik Pembangunan Kota Undip Semarang.

Widodo, Ahmadi. 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Kota Semarang)*, Tesis. Magister Teknik Pembangunan Kota. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

E. Makalah

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahiyangan. 1980. *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Madya Bandung*. Bahan Seminar Menggali Potensi PK sebagai unsur Pembangunan Dalam Pengembangan Bandung Indah.